

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Myanmar merupakan dua negara di Kawasan Asia Tenggara yang sempat mengalami masa-masa transisi politik. Kedua negara yang berjarak 4.000 km ini memiliki kesamaan historis yang dimulai dari perjuangan pahit meraih kemerdekaan dari negara koloni. Karena menyadari pentingnya arti kemerdekaan dan kedaulatan bagi sebuah negara, kedua negara ini kemudian menjadi pelopor dari dekolonisasi dunia di bawah pimpinan Soekarno dan U Nu. Selama perjalanannya baik Indonesia maupun Myanmar menghadapi tantangan yang serius dalam mempertahankan keutuhan nasional di tengah-tengah perbedaan yang kompleks dari berbagai ras, etnik, agama, Bahasa dan garis kebudayaan. Berbagai kesamaan historis ini pun menumbuhkan rasa kedekatan yang cukup kuat antar kedua negara

Indonesia sebagai salah satu negara dunia ketiga yang sempat mengalami keterlambatan selama proses demokrasi kini telah secara aktif mendorong nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam proses restorasi kekuasaan. Walaupun dalam prosesnya, pemerintah Indonesia sempat menghadapi berbagai dinamika politik yang terjadi akibat ketidakstabilan politik pasca reformasi, namun hal ini tidak menghentikan langkah Indonesia untuk melanjutkan proses "*nation building*" dalam rangka mewujudkan sistem demokrasi yang ideal. Walaupun memakan waktu yang cukup lama dan berkepanjangan namun perkembangan demokrasi di Indonesia telah menjadi salah satu model transisi kekuasaan yang stabil di Kawasan Asia Tenggara (Nguyen, 2015)..

Selain Indonesia negara lain di Kawasan yang juga mengalami proses transisi politik ialah Myanmar. Dalam hal ini baik Indonesia maupun Myanmar memiliki kesamaan dalam latar belakang sistem politik. Kedua negara di Kawasan ini mengalami sistem pemerintahan otoriter yang sangat ekstrim. Rezim militer telah mendominasi sistem politik dua negara tersebut pasca runtuhnya demokrasi parlementer pada tahun 1950an. Tepatnya pada tahun 1952 setelah rezim demokratis di Myanmar runtuh, sejak saat itu negara ini berada di bawah pimpinan dengan gaya otoriter dan diktator dimana seluruh kebijakan dibuat oleh pimpinan militer Rangoon, yang dipimpin oleh Jendral Ne win yang berkuasa selama dua dekade (1962-1988) di bawah kekuasaannya Myanmar ditransformasi menjadi negara yang isolasionis dengan ideologi sosialis, ia memperkenalkan “*Burmese way to Socialism*” dengan mendirikan partai BSPP (*Burmese Socialist Program Party*) perubahan sistem politik ini menyebabkan pelanggaran bukan hanya terhadap nilai-nilai demokrasi melainkan juga terhadap hak asasi manusia yang terbilang parah dengan tingkat konflik dan penganiayaan terhadap etnik minoritas yang terus meningkat (Min, 2008)

Sedangkan Indonesia pada saat itu berada di bawah pimpinan Jendral Soeharto selama tiga dekade yang berlangsung sejak tahun 1962-1998. Sejak saat itu Indonesia telah memainkan peranan penting dalam memberikan ideologi terhadap pimpinan militer Myanmar untuk mengambil alih kekuasaan pada tahun 1988. Namun tidak seperti yang mengalami kemunduran ekonomi pasca transisi politik oleh rezim militer, Indonesia di bawah pimpinan Soeharto mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sampai dengan tahun 1997. Terlepas dari fakta bahwa saat itu kedua negara di kuasai oleh rezim militer. Pada masa pemerintahan Soeharto Indonesia menerapkan sistem dwifungsi ABRI atau *dual functions military* dimana dengan

sistem ini peran militer mendominasi dan memiliki control penuh terhadap negara dan pertahanan nasional. Model dwifungsi ini kemudian turut diadopsi oleh rezim militer Myanmar dan dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan militer. Di samping pemerintah Myanmar bahkan memberikan pujian terhadap gaya kepemimpinan Soeharto dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki kesamaan identitas dengan Myanmar. Kesamaan identitas ini juga didukung dengan kedekatan hubungan pribadi yang terjalin antara Soeharto dan Ne Win yang diyakini telah berpengaruh terhadap situasi politik di Myanmar (Zaw, 1999). Di sisi lain Myanmar juga turut berpengaruh dalam menukung perkembangan perusahaan pertama penerbangan Indonesia yaitu, *Indonesian Airways*, dukungan ini ditandai dengan kesediaan Myanmar untuk menjadi pangsa pasar pertama bagi *Indonesian Airways*, lalu Myanmar juga turut menyediakan bantuan berupa persenjataan dan menara radio bagi relawan Indonesia yang sedang berjuang untuk melawan Belanda.

Hubungan kedekatan kedua negara inipun sebenarnya telah dimulai saat Indonesia dan Myanmar memberikan dukungan satu sama lain selama proses dekolonisasi di Asia Tenggara berlangsung, dapat dikatakan bahwa pada saat itu Pemerintah Indonesia telah memainkan peran dalam mendukung demokratisasi di Myanmar namun pada saat itu pendekatan yang digunakan oleh Indonesia masih berupa pendekatan konvensional berupa sebatas pendekatan politis. Kedekatan hubungan ini pun semakin erat ketika Myanmar yang masih belum menjadi anggota ASEAN karena status negaranya yang masih diklasifikasikan sebagai negara Non-sipil yang menganut sistem Authoritarian. Pada saat itu pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan keanggotaan Myanmar di tahun 1997. Dengan tergabungnya Myanmar ke dalam ASEAN, hal ini memberikan dampak

positif terhadap proses demokrasi di Myanmar melalui keterbukaan negara tersebut terhadap bantuan luar untuk menangani permasalahan internal Myanmar.

Seiring mengamati proses demokrasi dan permasalahan kemanusiaan yang masih terjadi di Myanmar, berbagai kalangan dari komunitas Internasional, negara-negara di Eropa bahkan Amerika serikat kemudian memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Melihat banyaknya tekanan tersebut, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk berdiri memberikan bantuan terhadap Myanmar untuk mencegah terjadinya isolasionisme Myanmar dengan meminta komunitas internasional untuk bersabar dan terus mendukung transisi demokrasi di Myanmar, hal ini disampaikan Indonesia melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa: *“We want Myanmar to fulfill its commitment to hold independent, transparent, democratic and inclusive elections... Nonetheless, one should not expect perfect conditions in Myanmar Instantly, as.. otherwise we will even not be able to see the development”*. (Lang, 2012). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perlu melakukan perubahan strategi pendekatan dengan mengkolaborasikan aspek politik, sosial dan ekonomi ke dalam sebuah pendekatan konstruktif yakni *Constructive Engagement*. Disamping itu Indonesia meyakini bahwa perubahan politik merupakan sebuah bentuk perubahan evolusioner yang membutuhkan waktu yang lama dan perkembangan sosial dan ekonomi sebagai aspek pendukungnya. Perubahan strategi pendekatan Indonesia ini pun menjadi sebuah metode baru dalam menelaah tujuan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab alasan bagaimana upaya Pemerintah Indonesia menerapkan strategi *Constructive Engagement* sebagai kebijakan politik luar negerinya untuk mendukung demokratisasi di Myanmar

C. Rumusan masalah

Dari latar belakang skripsi ini, maka rumusan masalah yang muncul adalah : “Bagaimana upaya strategi *Constructive Engagement* pemerintah Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar ?”

D. Kerangka pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulisan skripsi ini akan menggunakan dua jenis konsep yaitu, konsep politik luar negeri, dan konsep kepentingan nasional, serta menggunakan satu jenis model yaitu, model pendekatan *constructive engagement*

1) Konsep Politik Luar Negeri

Definisi mengenai politik luar negeri dapat dimulai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya yang berjudul *The International Relations Dictionary* yang mengemukakan bahwa

“Foreign policy is a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis à vis other states or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest” (Jack C. Plano & Roy Olton, 1969)

Politik luar negeri merupakan sebuah strategi atau tindakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang ditujukan terhadap negara lain atau entitas internasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang

didasarkan pada kepentingan nasional negara tersebut. Definisi tersebut kemudian diikuti oleh pernyataan Robert Jackson & Georg Sorensen yang menyatakan bahwa politik luar negeri terdiri dari tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama hubungan dengan negara-negara asing (Robert Jackson & Georg Sorensen, 2013). Politik luar negeri juga terdiri dari formula nilai, sikap, arah, dan sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan mencapai kepentingan nasional dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005). Politik luar negeri juga membahas mengenai sistem dalam pemerintahan suatu negara untuk mempengaruhi sikap negara lain. Adapun tindakan atau sikap suatu negara dalam menanggapi lingkungan eksternalnya dapat dikatakan sebagai bagian dari politik luar negeri. Menurut K.J. Holsti dalam bukunya *international politics* mengemukakan bahwa politik luar negeri terhadap hubungan negara merupakan hal yang penting di dalam ilmu hubungan internasional (Holsti, 1983) dalam buku ini pula dikemukakan tiga kriteria dari politik luar negeri : (1) nilai yang diletakkan pada tujuan, atau sejauh mana pembuat kebijakan melibatkan diri dan sumber daya negaranya untuk mencapai tujuan tertentu; (2) unsur waktu yang diletakkan pada pencapaiannya; dan (3) jenis tuntutan yang diletakkan dalam tujuan terhadap negara lain dalam sistem itu.

Hubungan Indonesia dan Myanmar telah terjalin dengan baik terutama sejak kedua negara memulai perubahan sistem politik dengan pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim militer. kesamaan historis yang dimiliki kedua negara ini kemudian mendorong kedekatan hubungan bilateral

yang terjalin hingga saat ini. Terlihat dari bagaimana politik luar negeri Indonesia secara aktif ikut mendorong penyelesaian masalah kemanusiaan dan Demokrasi di Myanmar. Berbagai upaya bantuan yang diberikan Indonesia pun diterima dengan baik oleh pemerintah Myanmar. Hal ini merupakan suatu pencapaian besar yang dilakukan oleh Indonesia mengingat bahwa Myanmar tidak memberikan izin kepada negara atau organisasi internasional manapun untuk memasuki wilayah negara Myanmar. Indonesia melalui politik luar negerinya menunjukkan kepemimpinan progresif dan membagikan pengalamannya dalam menangani konflik separatis, Indonesia juga aktif dalam meyakinkan Myanmar melalui pendekatan bilateral bahwa permasalahan HAM di negara tersebut dapat diselesaikan begitu juga dengan isu demokratisasi dapat diatasi dengan baik apabila Myanmar berkomitmen untuk melepaskan sifat isolasionisme yang selama ini menghambat proses demokratisasi. Tindakan Indonesia ini pun dinilai dapat mendorong pengurangan secara bertahap keterlibatan penggunaan kekuatan militer dalam hubungan politik negara yang baru melewati masa transisi demokrasi seperti yang dihadapi Myanmar (Holliday, 2008)

Indonesia di bawah administrasi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang dilanjutkan oleh presiden Joko Widodo terus menerapkan strategi pendekatan konstruktif dalam mengelola masalah luar negeri dan implikasinya terhadap kepentingan nasional Indonesia. Politik luar negeri Indonesia terhadap Myanmar ini juga timbul sebagai respon dari tindakan Myanmar dan permasalahan demokrasi di negaranya yang turut mempengaruhi stabilitas Kawasan, kondisi geografis dan kedekatan hubungan kedua negara telah menajadi sebuah pertimbangan konteks internasional

yang membentuk politik luar negeri Indonesia terhadap Myanmar

2) Konsep Diplomasi

Diplomasi merupakan sebuah instrument penting dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dan bagian dari upaya untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain, seperti yang diungkapkan oleh R.P. Barston dalam bukunya yang berjudul *Modern Diplomacy*, ia mengungkapkan bahwa :

“Diplomacy is concerned with the management of relations between states and between states and other actors. From a state perspective diplomacy is concerned with advising, shaping and implementing foreign policy. As such it is the means by which states through their formal and other representatives, as well as other actors, articulate, coordinate and secure particular or wider interests, using correspondence, private talks, exchanges of view, lobbying, visits, threats and other related activities” (R.P., 1997).

Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor dalam hubungan internasional lainnya. Dari sudut pandang negara, diplomasi berhubungan dengan upaya membentuk dan mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri, melalui perwakilan resmi atau aktor-aktor lain yang berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional negara yang bersifat khusus atau luas, dan

dilakukan dengan cara korespondensi, pembicaraan informal, diskusi dengan saling menyampaikan cara pandang terkait isu tertentu, lobby, kunjungan antar negara, dan aktivitas lainnya yang terkait. Pandangan ini kemudian diikuti oleh pemikiran Adam Watson dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy: Dialogue Between States* mengungkapkan bahwa, meskipun diplomasi pada umumnya berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang terbilang damai, namun di sisi lain diplomasi juga dapat terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama dari diplomasi bukan hanya berupa manajemen konflik melainkan juga terhadap manajemen perubahan dan juga pemeliharanya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung. (Watson, 1984) . dalam mengkaji konsep Diplomasi maka ada beberapa hal yang tampak seperti yang diungkapkan oleh SL Roy, bahwa beberapa hal tersebut antara lain. Pertama, jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Kedua, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara.

Ketiga, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. Keempat, apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional maka Teknik-teknik diplomasi dilakukan untuk menyipkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. Kelima, diplomasi dhubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. Keenam, diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara. Ketujuh, diplomasi juga tak bisa dipisahkan dengan perwakilan negara. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa “*diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan*

hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya". Dari penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa terdapat dua perbedaan utama dalam diplomasi yakni, *soft diplomacy* yang menitikberatkan pada penggunaan cara-cara damai dalam melakukan diplomasi dan *hard diplomacy* yang cenderung mendukung penggunaan ancaman atau *hard power* sebagai tools dalam mendapatkan tujuan-tujuan diplomasi.

Soft power diplomacy merupakan konsep diplomasi non-tradisional yang mulai berkembang pada abad ke-21, konsep diplomasi ini digambarkan sebagai kemampuan negara untuk mencapai tujuan-tujuannya melalui atraksi, termasuk kebudayaan, nilai, kebijakan luar negeri dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan unsur "pemaksaan". Dalam hal ini pemaksaan diartikan sebagai bagian dari konsep *hard power diplomacy* yang mengarah pada penggunaan kekuatan militer, embargo atau ancaman (Nye., 2008). Joseph Nye sebelumnya juga mengemukakan bahwa *soft diplomacy* menjadi kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui kerjasama dalam membentuk agenda, mengajak serta pihak lain untuk melakukan serangkaian kegiatan positif untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dapat dikatakan bahwa diplomasi seperti ini dilakukan berdasarkan keinginan masing-masing pihak secara sukarela dan sebagai hasilnya hal tersebut memberikan kontribusi positif terhadap tiap pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia menerapkan *Soft power diplomacy* sebagai instrument dalam melaksanakan politik luar negeri dalam mendukung demokratisasi di Myanmar. dimana *soft diplomacy* menjadi sebuah upaya yang dianggap efektif dan efisien tanpa harus menciptakan konfrontasi dengan Myanmar yang diketahui cukup selektif dalam menerima kerjasama dan bantuan dari pihak lain terutama apabila bersangkutan dengan isu demokrasi dan HAM yang selama ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Myanmar. oleh sebab itu pemerintah Indonesia menyediakan strategi *soft power diplomacy* yang ditargetkan untuk dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan Myanmar, mengajak Myanmar untuk berpartisipasi dalam forum pertemuan regional yang membahas mengenai penyelesaian masalah dalam menyelenggarakan demokratisasi dan penguatan HAM. Seiring berjalannya waktu upaya-upaya ini diyakini dapat memberikan kontribusi positif bukan hanya kepada Indonesia sebagai negara yang menerapkan *soft power diplomacy* melainkan juga terhadap Myanmar dimana melalui upaya ini Pemerintah Indonesia berharap dapat merangkul Myanmar dan mempengaruhi negara tersebut untuk menerapkan langkah-langkah demokratisasi yang lebih baik sehingga pada gilirannya hal ini dapat mendorong terciptanya model demokrasi yang stabil dan mendorong perlindungan serta pemeliharaan terhadap HAM di Myanmar.

3) **Model *Constructive Engagement***

Model *Constructive Engagement* merupakan sebuah pendekatan terhadap isu keamanan dan strategi, yang pertama kali muncul

sebagai bentuk respon Amerika Serikat terhadap hubungannya dengan Afrika Selatan pada tahun 1970-1985 (Coker, 1986). Model ini penerapan sanksi dan isolasi yang dapat menyebabkan konfrontasi antara pihak yang terlibat. Sebagai sebuah bentuk tindakan dalam kebijakan luar negeri., *Constructive Engagement* didasarkan pada sebuah premis bahwa dimungkinkan menerapkan tekanan terhadap pihak lain untuk menghasilkan perubahan yang bersifat konstruktif tanpa menggunakan metode paksaan terhadap suatu pihak (Crocker, 1986). Penolakan penggunaan sanksi dan strategi isolasi oleh model *Constructive Engagement* berakar asumsi mengenai tingkat keefektifitasannya. Sebab menurut model ini terdapat hubungan yang kuat antara aspek politik dan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan. dalam hal ini aspek ekonomi sendiri meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi, melalui berbagai bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi ini maka diyakini dapat mendorong perubahan politik di dalam suatu negara (Ivanica, 1998). Oleh sebab itu jika ingin mendorong transisi sistem politik dalam negeri suatu negara maka hal lain yang harus diperhatikan ialah pentingnya untuk membentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang pada gilirannya akan mendukung keberlangsungan demokratisasi suatu negara. Model *Constructive Engagement* meyakini bahwa perubahan dalam sistem politik dapat dicapai apabila didukung oleh kondisi ekonomi dan sosial yang baik untuk menopang proses demokrasi yang terjadi dalam negeri.

Constructive Engagement sendiri mulai diadopsi oleh ASEAN pada tahun 1991 yang bertujuan untuk mendorong hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar. Hal ini dilakukan untuk mendukung perkembangan ekonomi-sosial dalam negeri Myanmar yang pada gilirannya perkembangan ini akan memberikan pengaruh terhadap liberalisasi politik dan demokratisasi di Myanmar (Masilamani Logan, Peterson Jimmy, 2014)

Indonesia kemudian turut mengadopsi model *Constructive* untuk mendukung penyelesaian masalah demokrasi di Myanmar. Pendekatan ini mengedepankan upaya konstruktif yang dibangun atas dasar solidaritas, kedekatan, persaudaraan dan kemitraan dalam berbagai bidang. *Constructive Engagement* ini dijadikan sebagai strategi diplomasi persuasif pemerintah Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar. Melalui strategi ini Indonesia berupaya untuk mengutamakan konsensus, menghindari terciptanya konfrontasi antara kedua negara dan mendorong semangat inklusif demi terwujudnya demokrasi dan pengutan perlindungan HAM di Myanmar (Hongwei, 2012)

Saat ini pemerintah Indonesia secara berkelanjutan terus menerapkan startegi *Constructive Engagement* dalam kebijakan politik luar negeri untuk melihat bahwa langkah-langkah demokratisasi Myanmar terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Penerapan Strategi ini sendiri dilakukan dengan menggelar kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan diikuti oleh pendekatan politis.

E. Hipotesa

Dalam rangka mendukung demokratisasi di Myanmar Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai bentuk upaya pendekatan *Constructive Engagement* dalam kebijakan politik luar negerinya, upaya-upaya tersebut diantara lain:

1. Melakukan pendekatan dalam bidang politik melalui forum bilateral maupun multilateral seperti *Bali Democracy Forum* dan *Institute for Peace and Democracy*
2. Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan dibentuknya perjanjian perdagangan dan penanaman investasi ke dalam negeri Myanmar guna mendukung pembangunan nasional dalam negeri Myanmar
3. Melaksanakan diplomasi kemanusiaan sebagai upaya dalam menangani penyelesaian isu HAM dalam negeri Myanmar yang selama ini menghambat terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam proses transisi politik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap permasalahan yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisa guna memberikan pembahasan secara mendalam dan menyeluruh terhadap masalah yang dikaji. Selain menggunakan metode kualitatif, skripsi ini juga menggunakan beberapa metode dalam melakukan pengumpulan data

1) Metode pengumpulan data

- a. Penelitian Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data-data pendukung yang berasal dari buku dan jurnal yang dapat mendukung uraian penjelasan masalah

b. **Penelitian Media**

Pengumpulan data pendukung lainnya dilakukan melalui berbagai berita di media cetak maupun berita di internet dan sosial media yang dapat mendukung uraian penjelasan masalah yang dipaparkan

2) **Analisis data**

Analisa data dilakukan sebagai proses untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, analisis data ini bersifat induktif dimana Analisa data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian menyesuaikan data yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyusun suatu penjelasan yang utuh berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

3) **Interpretasi data**

Interpretasi data dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis data dengan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya, kemudian meninjau kaitan antara konsep atau model yang digunakan dengan permasalahan yang dibahas guna memperluas Analisa data. Intrepertasi data juga dilakukan dengan menambahkan pandangan kritis terhadap hasil Analisa data yang dilakukan sebelumnya

G. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan masalah mengenai *“Conructive Engagement sebagai startegi kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar”* tidak terlalu luas, maka pembahasan mengenai

topik permasalahan tersebut dibatasi pada peristiwa yang terjadi dalam jangka waktu 2011 pada saat Indonesia mulai melakukan pendekatan konstruktif terhadap Myanmar hingga pada puncak keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar pada 2017.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai topik skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari:

BAB I memaparkan penjelasan mengenai latar belakang masalah, tujuan Penulisan skripsi, rumusan masalah yang akan dijawab, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, dan hipotesa sebagai dugaan awal mengenai jawaban atas rumusan masalah. Serta pada bab ini pula terdapat pemaparan mengenai metode penulisan skripsi, Batasan masalah dan pengelompokan materi penulisan

BAB II menjelaskan tentang perjalanan hubungan bilateral antara Indonesia dan Myanmar dari sebelum proses transisi politik kedua negara dimulai

BAB III memaparkan mengenai demokratisasi dan transisi politik yang terjadi di Myanmar

BAB IV memaparkan mengenai upaya *Constructive Engagement* dalam politik luar negeri Indonesia untuk mendukung demokratisasi di Myanmar

BAB V menunjukkan kesimpulan akhir dari pembahasan masalah yang akan dikaji